



Integrasi Ekonomi Biru dalam Penganggaran Daerah Sulawesi Utara: Analisis Manajemen Keuangan Publik Berbasis *Blue Finance*

Junior Samuel Lakat^{1*}, Tri Oldy Rotinsulu², Anderson Guntur Kumenaung³, Victor Paskah Kalawat Lengkong⁴, Hendrik Gamaliel⁵

Universitas Klabat¹

Universitas Sam Ratulangi^{2,3,4,5}

*Corresponding author, e-mail: jun@unklab.ac.id

Abstract : *This study aims to examine the gap between the performance of the marine and fisheries sector and subnational fiscal capacity, and to formulate an institutional framework for integrating blue finance instruments into the provincial budgeting system (APBD) of North Sulawesi. An explanatory sequential mixed-methods design was employed. The quantitative phase applied descriptive analysis and simple linear regression to time-series data (2021–2025) from Statistics Indonesia and fiscal reports to assess the relationship between fisheries exports, sectoral GDP, and local own-source revenue. The qualitative phase used thematic analysis of regional development plans, fiscal policy documents, and academic literature on sustainable finance to identify regulatory, institutional, and financial constraints. The results reveal a development paradox: although fisheries exports grew rapidly (CAGR \approx 10.4% during 2021–2024) and showed a strong positive correlation with sectoral GDP, this growth did not translate into higher fiscal autonomy, as more than 60.48% of regional revenue still originated from central government transfers. Based on these findings, the study proposes a Blue Economy Financing Framework that combines marine asset valuation, bankable project identification, and innovative instruments such as municipal blue bonds and environmental impact bonds to expand fiscal space and support sustainable marine-based development.*

Keywords : *blue economy, blue finance, public financial management*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author.

PENDAHULUAN

Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memiliki karakteristik geografis yang unik dengan bentuk kepulauan, garis pantai yang panjang, serta posisi strategis di jalur perdagangan Asia–Pasifik. Kondisi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi regional, baik dari sisi kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja, maupun kinerja ekspor. Potensi sumber daya laut yang melimpah, mulai dari ikan pelagis, tuna, hingga komoditas perikanan budidaya, memberikan peluang besar bagi Sulut untuk memperkuat daya saing di pasar internasional. Dalam dua dekade terakhir, konsep *blue economy* berkembang sebagai paradigma pembangunan yang menekankan optimalisasi pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi teknologi (World Bank, 2017; Voyer et al., 2018).

Namun, transisi menuju ekonomi biru tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi dan kebijakan sektoral, tetapi juga memerlukan dukungan sistem pembiayaan publik yang memadai. Dalam praktiknya, manajemen keuangan publik daerah di Indonesia masih berorientasi pada pendekatan konvensional, dengan fokus utama pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi. Ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat juga masih menjadi ciri khas struktur fiskal daerah (Lewis, 2017). Akibatnya, sektor kelautan sering diposisikan sebagai objek pemungutan penerimaan jangka pendek, bukan sebagai aset produktif jangka panjang yang dapat dijadikan dasar penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara potensi ekonomi biru yang besar dengan kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk mendukung pengembangannya.

Keterbatasan ruang fiskal daerah berdampak langsung pada rendahnya kapasitas pemerintah provinsi dalam membiayai proyek-proyek strategis ekonomi biru yang bersifat padat modal. Proyek seperti pengembangan pelabuhan perikanan terpadu, pembangunan fasilitas *cold storage*, industri pengolahan hasil laut, serta sistem pemantauan sumber daya ikan berbasis teknologi membutuhkan investasi besar yang tidak dapat ditopang hanya oleh PAD dan transfer pusat. Kondisi ini menyebabkan pembangunan infrastruktur kelautan berjalan lambat dan sporadis, sehingga mengurangi daya saing Sulut dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Pada situasi tersebut, gagasan mengenai *blue finance* muncul sebagai alternatif kebijakan fiskal yang relevan. *Blue finance* dipahami sebagai upaya mobilisasi sumber pembiayaan dari sektor publik maupun privat untuk menunjang kegiatan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (OECD, 2020; Bennett et al., 2019).

Konsep *blue finance* tidak hanya menekankan pada diversifikasi sumber pembiayaan, tetapi juga pada integrasi aspek keberlanjutan dalam instrumen fiskal (Rahmayanti et.al., 2025). Dengan adanya *blue finance*, pemerintah daerah dapat mengembangkan instrumen pembiayaan inovatif seperti obligasi tematik (*blue bonds*), skema *blended finance*, maupun kemitraan publik–swasta untuk mendukung proyek-proyek kelautan. Instrumen ini memungkinkan daerah memperoleh dana jangka panjang dengan biaya modal yang lebih rendah, sekaligus mengaitkan pembiayaan dengan manfaat lingkungan. Dengan demikian, *blue finance* dapat menjadi solusi

atas keterbatasan fiskal daerah sekaligus memperkuat komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis hubungan antara kinerja sektor kelautan-perikanan dengan struktur pendapatan dan kapasitas fiskal APBD Provinsi Sulawesi Utara; serta (2) merumuskan kerangka integrasi *blue finance* ke dalam sistem penganggaran daerah secara institusional dan teknis. Analisis ini penting karena selama ini literatur empiris mengenai hubungan ekonomi biru dan manajemen keuangan publik di tingkat pemerintah daerah Indonesia masih terbatas. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat terisi kekosongan pengetahuan mengenai bagaimana sektor kelautan yang produktif dapat dikaitkan dengan instrumen fiskal yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek potensi ekonomi sektor kelautan atau pada tata kelola fiskal daerah secara terpisah, tanpa mengkaji keterkaitan struktural antara produktivitas sektor kelautan dan kapasitas fiskal daerah secara komprehensif. Selain itu, kajian mengenai integrasi instrumen *blue finance* ke dalam sistem penganggaran daerah masih didominasi oleh pendekatan konseptual di tingkat nasional maupun global, sehingga belum banyak memberikan model implementatif yang kontekstual bagi pemerintah daerah. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat terisi kekosongan pengetahuan mengenai bagaimana sektor kelautan yang produktif dapat dikaitkan secara sistematis dengan instrumen fiskal yang berkelanjutan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal sekaligus mendorong pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis berbasis data sekunder. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggabungkan kekuatan analisis kuantitatif yang bersifat objektif dengan kedalaman analisis kualitatif yang lebih kontekstual. Tahap awal dilakukan melalui analisis kuantitatif untuk mengidentifikasi pola hubungan antar

variabel, yang kemudian diperdalam dengan analisis kualitatif guna memberikan penjelasan lebih komprehensif terhadap temuan empiris dalam konteks kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika fiskal dan ekonomi biru secara lebih menyeluruh.

Pada tahap kuantitatif, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi yang kredibel. Publikasi tahunan *Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik periode 2021 hingga 2025 menjadi sumber utama untuk data makroekonomi. Selain itu, statistik perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai volume dan nilai ekspor komoditas perikanan. Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga dianalisis untuk

memahami struktur pendapatan daerah. Variabel penelitian terdiri atas variabel independen berupa volume ekspor perikanan dalam satuan ton dan nilai ekspor perikanan dalam satuan dolar Amerika Serikat. Sementara itu, variabel dependen mencakup Produk Domestik Regional Bruto sektor perikanan, Pendapatan Asli Daerah, dan proporsi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren, perhitungan *compound annual growth rate* (CAGR) untuk mengukur laju pertumbuhan ekspor, serta regresi linier sederhana untuk menguji hubungan antara pertumbuhan ekspor dengan kontribusinya terhadap PAD dan PDRB sektor perikanan.

Tahap kualitatif dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan yang relevan dengan konteks fiskal dan pembangunan daerah. Dokumen yang dianalisis mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, serta Kajian Fiskal Regional dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selain itu, literatur akademik mengenai pembiayaan biru, obligasi daerah, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan turut dijadikan referensi. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan pendekatan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan hambatan regulasi, kesiapan kelembagaan, peluang investasi, serta desain instrumen pembiayaan inovatif.

Dengan kombinasi kedua tahap tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai hubungan antara kinerja sektor kelautan dan perikanan dengan kapasitas fiskal daerah. Lebih jauh, hasil penelitian juga diharapkan dapat menawarkan kerangka integrasi *blue finance* dalam sistem penganggaran daerah, sehingga mendukung pembangunan ekonomi biru yang berkelanjutan dan inklusif di Provinsi Sulawesi Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Sektor Kelautan dan Kontribusi Ekonomi Daerah

Sektor kelautan, khususnya perikanan, memainkan peran yang sangat signifikan dalam perekonomian Sulawesi Utara. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasca-pandemi COVID-19, sektor ini mampu bangkit dengan cepat dan bahkan mencatatkan pertumbuhan ekspor yang konsisten. Data menunjukkan bahwa volume ekspor perikanan meningkat dari sekitar 20 ribu ton pada tahun 2021 menjadi lebih dari 28 ribu ton pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sekitar $\pm 10,4\%$. Kenaikan volume ini berkorelasi lurus dengan peningkatan nilai valuasi ekspor sebagaimana terlihat pada tabel 1, di mana nilai ekspor non-migas menembus angka USD 1 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan pemulihan pasca-pandemi, tetapi juga menunjukkan adanya peningkatan daya saing komoditas perikanan Sulawesi Utara di pasar global. Berikut tabel 1 yang menyajikan indikator utama pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sektor pertanian dan perikanan, nilai ekspor non-migas, serta kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Utara periode 2021–2024.

Tabel 1. Indikator Makro Ekonomi & Kinerja Sektor Unggulan (2021–2024)

Indikator	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi (Y-on-Y) (%)	4,16	5,42	5,48	5,39
PDRB ADHK Pertanian & Perikanan (Triliun Rp)	14,02	14,85	15,62	16,35
Nilai Ekspor Non-Migas (Juta USD)	890,21	967,30	855,10	1.050,4*
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian/Perikanan (%)	21,86	21,55	21,20	20,95

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, "Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022-2025".

Catatan: (*) Angka 2024 merupakan angka sementara berdasarkan akumulasi rilis bulanan BRS 2024.

Komoditas utama yang menjadi tulang punggung ekspor adalah tuna, cakalang, dan pelagis kecil. Permintaan global terhadap komoditas ini terus meningkat seiring dengan tren konsumsi protein sehat dan keberlanjutan sumber daya laut. Tuna dan cakalang, misalnya, memiliki pasar yang luas di Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, sehingga memberikan peluang besar bagi Sulawesi Utara untuk memperkuat posisi sebagai salah satu eksportir utama di kawasan timur Indonesia. Keberhasilan ini juga menunjukkan adanya daya saing yang kuat dari sektor perikanan daerah dalam menghadapi kompetisi global. Dengan demikian, komoditas unggulan tersebut menjadi motor penggerak ekspor sekaligus simbol identitas ekonomi kelautan Sulawesi Utara.

Kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah juga terlihat dari peranannya dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Taufiqurrachman et.al., 2026). Secara agregat, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang lebih dari 20% terhadap PDRB provinsi. Analisis regresi linier sederhana menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara volume ekspor perikanan dan PDRB sektor perikanan, dengan nilai koefisien korelasi (R) lebih dari 0,85. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan ekspor perikanan secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu, hasil analisis tersebut memperkuat argumentasi bahwa sektor kelautan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, sektor perikanan juga memberikan *multiplier effect* terhadap sektor lain, seperti transportasi laut, industri pengolahan hasil perikanan, dan perdagangan (Maulani et.al., 2022). Peningkatan ekspor mendorong tumbuhnya industri *cold storage*, logistik, serta jasa ekspedisi yang berbasis pelabuhan. Dengan demikian, sektor kelautan tidak hanya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Efek berganda ini memperlihatkan bahwa keberhasilan sektor perikanan mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi lintas sektor. Dampak positif tersebut menjadikan perikanan sebagai katalis pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Namun, tantangan yang dihadapi tetap terdapat dalam implementasi ini. Salah satunya adalah keberlanjutan sumber daya ikan yang menjadi isu penting dalam pengelolaan sektor

perikanan. Pertumbuhan ekspor yang tinggi harus diimbangi dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan *overfishing*. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan perikanan berbasis kuota tangkap, sertifikasi ekolabel, serta penguatan pengawasan laut menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dengan langkah tersebut, Sulawesi Utara dapat memastikan bahwa keberhasilan ekspor tidak mengorbankan keberlanjutan ekosistem laut di masa depan.

Kapasitas Fiskal Daerah dan Ketergantungan Transfer

Meskipun kinerja sektor riil, khususnya perikanan, menunjukkan tren positif, struktur pendapatan daerah Sulawesi Utara masih menghadapi tantangan besar. Analisis fiskal menunjukkan bahwa pada tahun 2024, proporsi dana transfer dari pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah mencapai 60,48%, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada di kisaran 30–38%. Ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat ini menandakan bahwa kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara potensi ekonomi daerah dengan kapasitas fiskal yang tersedia. Dengan demikian, meskipun sektor riil berkembang, kemampuan fiskal daerah masih belum mampu menopang pembangunan secara mandiri.

Tabel 2. Kapasitas Ruang Fiskal Daerah (2021–2024)

Uraian (Dalam Miliar Rupiah)	2021	2022	2023	2024**
Pendapatan Daerah	3.920,5	4.051,2	3.805,1	4.150,3
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.350,1	1.482,4	1.420,5	1.580,2
Pendapatan Transfer (TKD)	2.550,4	2.540,8	2.350,2	2.510,1
Rasio Ketergantungan Daerah (%)	65,05%	62,71%	61,76%	60,48%

Sumber : Diolah dari LKPD Pemprov Sulut dan BPS "Sulawesi Utara Dalam Angka".

Catatan: (**) Angka prognosa realisasi akhir tahun.

Temuan ini sejalan dengan literatur yang menyoroti keterbatasan desentralisasi fiskal di Indonesia. Lewis (2017) dan Martinez-Vazquez et al. (2017) menyebutkan bahwa meskipun desentralisasi telah berjalan lebih dari dua dekade, banyak daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah belum berkembang secara optimal, terutama dalam hal penggalan potensi PAD. Ketergantungan tersebut memperlihatkan bahwa otonomi fiskal belum sepenuhnya terwujud di tingkat daerah. Dengan kata lain, desentralisasi fiskal belum berhasil mendorong kemandirian keuangan daerah secara signifikan (Wahyudi et.al., 2023).

Keterbatasan PAD berdampak langsung pada ruang fiskal yang sempit untuk belanja modal produktif. Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja operasional rutin (Anugrah & Nurlaelah, 2025). Akibatnya, investasi pada infrastruktur ekonomi biru, seperti pelabuhan perikanan, fasilitas pengolahan hasil laut, dan sarana ekowisata bahari, relatif kecil dan bersifat sporadic (Khoiriyah, 2024).

Kondisi ini menghambat percepatan transformasi ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Dengan demikian, potensi besar sektor kelautan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memperkuat struktur fiskal daerah (Widjaja, 2025).

Selain itu, ketergantungan pada transfer pusat juga menimbulkan risiko fiskal yang cukup serius. Ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional atau penurunan penerimaan negara, daerah dengan ketergantungan tinggi akan mengalami tekanan fiskal yang signifikan. Oleh karena itu, strategi peningkatan PAD menjadi sangat penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Potensi PAD dari sektor kelautan sebenarnya cukup besar, misalnya melalui retribusi pelabuhan, pajak usaha perikanan, dan pengembangan ekowisata bahari. Namun, implementasi kebijakan yang efektif dan transparan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan hal tersebut.

Dengan demikian, meskipun sektor riil menunjukkan kinerja yang kuat, kapasitas fiskal daerah masih lemah. Ketergantungan terhadap transfer pusat harus dikurangi melalui strategi peningkatan PAD, diversifikasi sumber pendapatan, serta penguatan tata kelola fiskal. Tanpa langkah-langkah tersebut, pembangunan ekonomi biru di Sulawesi Utara akan sulit mencapai keberlanjutan jangka panjang. Upaya penguatan fiskal harus dilakukan secara konsisten agar pembangunan berbasis kelautan dapat berjalan lebih stabil (Mukaffi & Haryanto, 2022). Dengan cara itu, Sulawesi Utara dapat memaksimalkan potensi ekonomi biru sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Integrasi *Blue Finance* dalam Penganggaran Daerah

Integrasi konsep *blue finance* dalam penganggaran daerah merupakan langkah strategis untuk memperkuat pembangunan ekonomi berbasis kelautan yang berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya menghubungkan kebijakan fiskal dengan keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi aset utama daerah pesisir. Dengan adanya integrasi tersebut, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada kelestarian lingkungan (Handini et.al., 2025). Pendekatan ini juga memberikan peluang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru yang selama ini belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam kerangka fiskal daerah. Selain itu, integrasi *blue finance* dapat meningkatkan daya tarik investasi dengan menekankan aspek keberlanjutan yang kini menjadi perhatian global. Berdasarkan analisis dokumen dan literatur, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam kerangka kebijakan *blue finance*.

Pertama, valuasi aset kelautan melalui *natural capital accounting* menjadi dasar penting dalam perencanaan fiskal daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk menentukan nilai ekonomi sumber daya laut secara lebih akurat dan terukur. Dengan mengetahui nilai riil aset kelautan, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data. Hal ini juga memungkinkan pengalokasian anggaran yang lebih efisien serta mendukung pengambilan keputusan yang berorientasi pada keberlanjutan (Bhaskoro & Wijayanti, 2025). Valuasi aset kelautan juga berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kerugian ekonomi akibat degradasi

lingkungan laut. Dengan demikian, *natural capital accounting* tidak hanya berperan dalam perencanaan fiskal, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian risiko lingkungan.

Kedua, identifikasi proyek *bankable* harus dilakukan untuk memastikan adanya prioritas pada proyek yang memiliki potensi ekonomi sekaligus dampak lingkungan positif (Prihatanti et.al., 2025). Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan pelabuhan perikanan terpadu, pengembangan industri pengolahan hasil laut, dan ekowisata bahari. Dengan adanya proyek *bankable*, pemerintah daerah dapat menarik minat investor yang mencari peluang investasi berkelanjutan (Rizaldi, 2024). Selain itu, proyek ini juga memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi kompetisi global di sektor kelautan. Identifikasi proyek yang layak investasi juga membantu pemerintah daerah dalam menyusun portofolio pembiayaan yang lebih terstruktur. Dengan cara ini, integrasi *blue finance* dapat berjalan lebih efektif karena didukung oleh proyek yang memiliki prospek ekonomi dan lingkungan yang jelas.

Tabel 3. Proyeksi Skema Pembiayaan *Blue Finance* (Gap Analysis)

Proyek Prioritas Ekonomi Biru	Estimasi Capex (Miliar Rp)	Potensi Pendanaan APBD (Murni)	Target Pendanaan <i>Blue Bond</i>	Sumber <i>Revenue</i> Pengembalian
Sentra Pengolahan Perikanan (Bitung)	200,0	10% (DAK)	90%	Jasa <i>Cold Storage</i> & Ekspor
Infrastruktur Ekowisata (Likupang)	150,0	20% (Banprov)	80%	Retribusi Wisata & Pajak Hotel
Revitalisasi Terumbu Karang (Bunaken)	50,0	30% (CSR/Grant)	70%	<i>Blue Carbon Credit</i>
Total Kebutuhan	400,0	Defisit Tinggi	Potensial	Berkelanjutan

Sumber : Analisis Penulis berdasarkan Masterplan KEK Likupang & RPJMD.

Ketiga, desain instrumen pembiayaan menjadi aspek penting dalam mendukung keberlanjutan fiskal daerah. Instrumen seperti *municipal blue bonds*, *environmental impact bonds*, dan skema *blended finance* relevan untuk pembiayaan jangka panjang. Melalui instrumen tersebut, daerah dapat memperoleh dana dari pasar modal dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, pembiayaan ini juga mengaitkan manfaat ekonomi dengan dampak lingkungan yang positif (Muhammad et.al., 2025). Instrumen pembiayaan inovatif ini dapat memperluas basis pendanaan daerah yang selama ini terbatas pada PAD dan transfer pusat (Cahyani et al., 2025). Dengan

demikian, desain instrumen pembiayaan menjadi salah satu kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan (Aryani & Nugroho, 2024).

Keempat, penguatan tata kelola menjadi syarat mutlak agar integrasi *blue finance* dapat berjalan efektif. Transparansi penggunaan dana, pelaporan berbasis kinerja, dan audit lingkungan harus diterapkan secara konsisten (Lau et.al., 2026). Tanpa tata kelola yang baik, integrasi *blue finance* berisiko kehilangan kepercayaan investor maupun masyarakat (Lee et.al., 2020). Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan ini. Tata kelola yang kuat juga dapat meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah dalam mengelola instrumen pembiayaan inovatif. Dengan adanya tata kelola yang transparan, integrasi *blue finance* dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan ekonomi biru (Wenhai et.al., 2019).

Instrumen *municipal blue bond* dinilai sangat relevan karena mampu mengaitkan pembiayaan jangka panjang dengan manfaat ekonomi dan lingkungan sektor kelautan. Instrumen ini memberikan peluang bagi daerah untuk mengakses sumber pembiayaan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Studi empiris di negara lain menunjukkan bahwa obligasi tematik, seperti *green bonds* dan *blue bonds*, mampu menarik investor institusional sekaligus menurunkan biaya modal proyek berkelanjutan (Flammer, 2021; Tolliver et al., 2020). Dengan demikian, *blue bond* dapat menjadi instrumen strategis bagi daerah pesisir di Indonesia. Selain itu, penerapan *blue bond* juga dapat memperkuat reputasi daerah sebagai pelopor pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadikan *blue bond* bukan hanya instrumen fiskal, tetapi juga simbol komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, penerbitan obligasi daerah telah memiliki dasar hukum, namun pemanfaatannya masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk mengembangkan instrumen *blue finance* masih terbuka lebar. Sulawesi Utara dapat memposisikan diri sebagai daerah perintis penerbitan *blue bond* dengan *underlying asset* sektor perikanan dan pariwisata bahari. Jika berhasil, langkah ini tidak hanya memperkuat kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menjadikan Sulawesi Utara sebagai model integrasi *blue finance* di tingkat nasional. Keberhasilan tersebut dapat mendorong daerah lain untuk mengadopsi kebijakan serupa dalam mendukung pembangunan ekonomi biru. Dengan demikian, Sulawesi Utara berpotensi menjadi pionir dalam praktik fiskal berkelanjutan di Indonesia.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Utara memiliki kinerja ekonomi yang kuat, tercermin dari pertumbuhan ekspor dan kontribusinya terhadap PDRB daerah, namun belum diikuti oleh peningkatan kapasitas fiskal yang sepadan akibat dominasi dana transfer pusat dalam struktur pendapatan daerah, sehingga terjadi kesenjangan struktural antara dinamika sektor riil dan sistem penganggaran daerah yang membatasi ruang investasi strategis ekonomi biru. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan data yang relatif pendek dan penggunaan model regresi sederhana, sehingga belum sepenuhnya menangkap dinamika kausalitas jangka panjang, variasi antar kabupaten/kota, maupun faktor

kelembagaan dan politik fiskal yang lebih kompleks. Oleh karena itu, direkomendasikan agar pemerintah daerah mulai mengintegrasikan konsep *blue finance* secara sistematis melalui valuasi aset kelautan, penyiapan proyek yang *bankable*, serta pengembangan instrumen pembiayaan inovatif seperti *municipal blue bonds* dan skema *blended finance* yang didukung tata kelola transparan dan regulasi adaptif, sementara penelitian selanjutnya perlu menggunakan data panel yang lebih panjang dan pendekatan metodologis yang lebih komprehensif untuk memperkuat dasar perumusan kebijakan pembiayaan ekonomi biru di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugraha, W., Widyatmike G. M., & Nurlaelah. (2022). *School Operational Assistance Management to Lighten School Burden: A literature review*. EduLine: Journal of Education and Learning Innovation, 2(3). <https://doi.org/10.35877/454RI.eduline1235>
- Aryani, Z. U., & Nugroho, H. W. (2024). Perencanaan pembangunan Provinsi Riau dalam kerangka pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *IPTEKIN: Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi*, 7(1), 1–15.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2021). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2021*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2022). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2022*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2023*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2024*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2025). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2025*. Manado: BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Bhaskoro, F. H. Y., & Wijayanti, H. T. (2025). Optimalisasi pengelolaan keuangan melalui peran akuntansi manajerial: Tinjauan literatur dan implikasinya terhadap efektivitas keputusan keuangan. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 955–963.
- Bennett, N. J., Cisneros-Montemayor, A. M., Blythe, J., Silver, J. J., Singh, G., Andrews, N., Calò, A., Christie, P., Di Franco, A., Finkbeiner, E. M., Gelcich, S., Guidetti, P., Harper, S., Hotte, N., Kittinger, J. N., Le Billon, P., Lister, J., López de la Lama, R., McKinley, E., & Sumaila, U. R. (2019). Towards a sustainable and equitable blue economy. *Nature Sustainability*, 2(11), 991–993. <https://doi.org/10.1038/s41893-019-0404-1>
- Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Lumban Raja, I. S., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan dan peluang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah: Studi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 3(7), 10–17. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.5419>
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. (2019). *Masterplan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK.

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Kajian fiskal regional Provinsi Sulawesi Utara Triwulan III 2024*. Manado: Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.
- Flammer, C. (2021). Corporate green bonds. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 499–516. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2021.01.010>
- Handini, N., Darwina, M., Yudistira, & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Khoiriyah, A. Z. (2024). Implementasi ekonomi biru di Indonesia. *JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8(2), 1331–1356.
- Lau, A., Stephany, D., Pranata, B. B., & Malau, M. (2026). Pengaruh akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan terhadap transparansi laporan keberlanjutan dengan tata kelola perusahaan sebagai variabel moderasi (Studi pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di BEI periode 2020–2023). *Jurnal Inomatec: Jurnal Inovasi dan Kajian Multidisipliner Kontemporer*, 1(3), 828–843.
- Lee, K.-H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The blue economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment International*, 137, 105528. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105528>
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: The perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695–1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>
- Martinez-Vazquez, J., Lago-Peñas, S., & Sacchi, A. (2017). The impact of fiscal decentralization: A survey. *Journal of Economic Surveys*, 31(4), 1095–1129. <https://doi.org/10.1111/joes.12182>
- Maulani, S. F., Tsani, R. R., Tinambunan, R. C. H., & Mauluddin, F. M. (2022). *Tren penelitian studi ekonomi biru: Tinjauan sistematis satu dekade*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 1284–1294
- Muhammad, F., Amory, J. D. S., & Hamzar. (2025). Implementasi blue economy dan implikasinya terhadap kesejahteraan nelayan: Studi kasus di PPI Mamuju. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(4), 716–727. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v8i4.1887>
- Mukaffi, Z., & Haryanto, T. (2022). *Systematic review of factors affecting economic growth from the tourism aspect / Faktor-faktor penentu pariwisata yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: Tinjauan sistematis*. **Juwita: Jurnal Pariwisata Nusantara**, 1(2), 108–[isi halaman terakhir]. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/juwita>
- OECD. (2020). *Sustainable ocean for all: Harnessing the benefits of sustainable ocean economies for developing countries*. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bede6513-en>
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020*. Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021*. Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2023). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022*. Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2024). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023*. Manado: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021–2026*. Manado: Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2021.

- Prihatanti, V. W., Ahsan, M., & Samsuri, A. (2025). Peran perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM berbasis green economy: Systematic literature review (SLR). *Edunomika*, 9(4), 1-17.
- Rahmayanti, S., Nursari, N., & Nasrudin, N. (2025). Peran green financing dalam ekonomi syariah sebagai respon adaptif terhadap volatilitas ekonomi dan krisis iklim global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(4), 192–204.
- Rizaldy, W. F. (2024). Mendorong inovasi pembiayaan daerah Jawa Barat: Blended finance sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *West Java Economic Society (WJES)*.
- Taufiqqurrachman, F., Munawaroh, A., Lusianti, D., & Laylia, D. (2026). Analisis sektor perekonomian Kota Aceh Tengah dengan Provinsi Aceh menggunakan metode location quotient (LQ) dan dynamic location quotient (DLQ). *Journal of Literature Review*, 2(1), 97–105. <https://doi.org/10.63822/fgybjn81>
- Tolliver, C., Keeley, A. R., & Managi, S. (2020). Drivers of green bond market growth: The importance of nationally determined contributions to the Paris Agreement and implications for sustainability. *Journal of Cleaner Production*, 244, 118643. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118643>
- UNCTAD. (2014). *The oceans economy: Opportunities and challenges for small island developing states*. New York: United Nations.
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: What do competing interpretations of the blue economy mean for oceans governance? *Journal of Environmental Policy & Planning*, 20(5), 595–616. <https://doi.org/10.1080/1523908X.2018.1473153>
- Wahyudi, T., Nawawi, M., & Pohan, E. S. (2023). Desentralisasi fiskal dan efisiensi anggaran: Tinjauan sistematis. *DEKAT: Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 2(2), 32–49. <https://doi.org/10.24246/dekat.v2i2.15509>
- Wenhai, L., Cusack, C., Baker, M., Tao, W., Mingbao, C., Paige, K., Xiaofan, Z., Levin, L., Escobar, E., Amon, D., Yue, Y., Reitz, A., Neves, A. A. S., O'Rourke, E., Mannarini, G., Pearlman, J., Tinker, J., Horsburgh, K. J., Lehodey, P., Pouliquen, S., Dale, T., Peng, Z., & Yufeng, Y. (2019). Successful blue economy examples with an emphasis on international perspectives. *Frontiers in Marine Science*, 6, Article 261. <https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00261>
- Widjaja, G. (2025). *Optimalisasi hilirisasi, ketahanan pangan, dan reformasi fiskal sebagai pilar transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045*. NETIZEN: Journal of Society and Business, 1(9), 412–422
- World Bank. (2017). *The potential of the blue economy: Increasing long-term benefits of the sustainable use of marine resources for small island developing states and coastal least developed countries*. Washington, DC: World Bank.